

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU

Rosna

rosnalahasan73@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The Implementation of Investment Licensing Services Policy at Integrated Licensing Service Agency, Palu has not run optimally It is caused by 4 main factors, they are communication, res Keywords: Evaluation of the National Sports System, Human Resources .Disposition, and bureaucracy structure that have not run effectively yet the implementation, supporting means like human resource is limited. This research aims at analyzing the policy of investment licensing service as resource, disposition, and bureaucracy structure. The method used in this research is qualitative with 5 informants taken by using purposive sampling technique. The data was collected by interview and documentation study and then analyzed with interactive method. This research results (1) Communication; socialization to society was still limited (2) Resource; the limited employees that comprehend service and licensing rules, the lack of self development professionally, limitation of operational service vehicles (3) Disposition; although BP2T has shown a quality of services, but it is constrained in investment sector at Regional Planning and Investment Agency (4) Bureaucracy structure; at Licensing and Service Agency of Palu City, so far has run as the procedures. It is proven by the existence of tasks rationing at each sector and based on SOP, and the responsible employees of Integrated Licensing Service Agency in carrying out public services.

Keywords: *Investment Licensing*

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam konteks wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara secara konkrit.

Sejalan dengan bergesernya paradigma yang mengacu pada konteks pelaksanaan otonomi daerah, dimana setiap kegiatan yang ada di suatu lembaga atau instansi akan memiliki peningkatan volume pekerjaan yang menuntut kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia atau pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah dengan menyederhanakan proses pelayanan

perizinan yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 BAB III Tahun 2006 yang menyatakan Bupati/Walikota wajib melakukan penyerdehanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Penyerdehanaan pelayanan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PTSP.
- 2) Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melabihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 3) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 4) Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non

perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya

- 5) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- 6) Pembebasan biaya perizinan bagi usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 7) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Sebagai Implementasi

PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006, kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, dan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan bagi pelaku usaha, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tidak terlepas dengan melakukan penanaman modal.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara penanaman modal maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal. Untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penanaman modal merupakan penggerak perekonomian daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan

ekonomi. Dalam PERDA Kota Palu Nomor 17 Pasal 1 Nomor 22 Tahun 2012 Menyatakan bahwa, Pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang dapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Pemerintah Kota Palu telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008. Sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, yang antara lain menyebutkan tentang jenis-jenis perizinan yang diselenggarakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi 29 (Dua Puluh Sembilan) jenis izin usaha yaitu : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek / Operasi, Izin Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Sui Usaha Industri; Tanda Daftar perusahaan; Tanda Daftar Gudang; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Izin Praktek Tenaga Kesehatan; Izin Sarana Kesehatan Swasta; Izin Prinsip PMDN; Izin Prinsip perluasan PMDN; Izin Prinsip perubahan PMDN; Izin Usaha PMDN; Izin Usaha perluasan PMDN; Izin Usaha perubahan PMDN; Izin Usaha pengabungan PMDN; Izin Penyelenggaraan Reklame; Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Izin Lokasi; Izin Usaha Perdagangan Waralaba; Izin Usaha Toko Modern; Izin Pertambangan; Izin Penggunaan Air Bawah Tanah; Izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Izin Lingkungan, Izin Usaha Perikanan dan Izin Usaha Peternakan.

Kemudian untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain ialah merumuskan Visi dan Misi serta program kegiatan. Visi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Palu ialah “Meningkatkan Investasi Daerah dalam Pelayanan Perizinan yang Prima dan Terpadu”; sedangkan Misinya ialah :

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan, ketepatan waktu dan profesionalisme;
- 2) Memberikan kepastian pelayanan perizinan
- 3) Membentuk Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melayani perizinan

Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Islamy, 1996) kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Carl Friedrich (dalam Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan kedua ahli tersebut jelas bahwa kebijakan itu bermakna sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan publik (*public policy*) menurut Kamus Administrasi Publik karangan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip oleh Keban (2008), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan Shafrits dan Russel (dalam Keban, 2008) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu (*a government decides to do or not to do*).

Implementasi

Kamus Websters mengartikan implementasi (*implement*), sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (*to provide the means for carrying out*), menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (*to give practical effect to*). Menurut Abdulwahab (2008) bahwa kalau pengertian ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Perssman dan Wildaysky (dalam Abdulwahab, 2008) mengatakan bahwa sebuah kata kerja “mengimplementasikan” itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda “kebijakan”. Van Meter dan Van Horn (dalam Abdulwahab, 2008) bahwa proses implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Gordon (dalam Keban, 2008) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi atau ditetapkan. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode, untuk melaksanakan program. Melaksanakan interpretasi adalah berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Sedangkan menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran dan sebagainya. Berdasarkan pengertian ini

maka implementasi dapat dikatakan merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program atau kebijakan (Keban, 2008).

Sapatier dan Mazmanian (dalam Abdulwahab, 2003) menjelaskan makna Implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Lester dan Stewart (dalam Kusumanegara, 2010) mengatakan implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dan akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *Implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986:21-48).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan

berbagai pihak yang berkepentingan (*Policy Stakeholders*).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dan beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan dan lengkap sesuai hasil penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Menurut Furchan dalam Budiman (2011:90) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini dilakukan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dan BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Palu. Adapun waktu yang digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dalam penelitian ini adalah mulai bulan 5 Januari s/d April 2015.

Salah satu teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan dan pengumpulan data adalah dengan melakukan interview atau

wawancara, sebagaimana, yang dikemukakan Esterberg dalam Sugiyono (2012:73) membagi tiga model wawancara yakni, wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur penulis menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan alat bantu lainnya seperti alat perekam suara, video handycam, dan lain-lain. Wawancara semi struktur dilakukan dengan cara lebih terbuka dengan tujuan untuk mendapatkan data secara sempurna dari ide dan pendapat informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas dan tidak tersusun sebagaimana dalam instrumen pedoman wawancara.

Sesuai dengan penelitian ini informan kunci adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu yang memahami secara keseluruhan tentang permasalahan penelitian juga dilakukan kepada Pejabat BP2T lainnya dan Pejabat BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Palu serta unsur masyarakat dengan asumsi bahwa Informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun informan yang menjadi sumber informasi adalah :

1. Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Palu 1 orang
2. Kepala Bidang Pelayanan Dan Koordinasi BP2T Kota Palu 1 orang
3. Kepala Bidang Penanaman Modal BAPPEDA Kota Palu 1 orang
4. Kabid Evaluasi Dan Informasi 1 orang
5. Masyarakat Penerima Layanan 1 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kenyataannya jika melihat dari kondisi pelayanan perizinan yang dilakukan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu yang seharusnya dilakukan secara paripurna namun dalam pelaksanaannya belum memberikan pelayanan yang paripurna karena dalam pelaksanaan sebagian pelayanan yang

dilakukan masih dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Pelayanan terpadu satu pintu yang disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian serta yang menyelenggarakan adalah pemerintah yang diberikan wewenang dalam hal perizinan yang berhubungan dengan produk pelayanan dan perizinan. Sedangkan perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam pelaksanaan pelayanan dan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dituangkan dalam beberapa pandangan-pandangan di atas maka dapat dipastikan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut lebih maksimal lagi dalam pencapaian tujuan dari kinerja yang diharapkan yaitu cepat, tepat dan efisien.

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu tidak terlepas dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Pada Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan. Pada Badan Pelayanan dan Perizinan Kota Palu melayani perizinan Penanaman modal yang disebut sebagai izin prinsip serta dalam pengawasannya berada pada BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Palu. Izin prinsip dilakukan sebelum usaha pabrik dan industri mulai berjalan sedangkan izin usaha dikeluarkan sebagai legalitas usaha dapat berjalan. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia

dalam bentuk investasi. selanjutnya nama-nama investor yang menanamkan modalnya di kota palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Nama-Nama Investor Penanam Modal

No	Nama	Alamat	Kegiatan Usaha
1	Eva Rantung	Jl. Martadinata KM 8 Palu	Perdagangan susu dan Prodak susu
2	Mattalata Sophian	Jl. Malonda Buluri Palu	Penggalian Batu Bangunan
3	PD Andi Iolo,SE,MM	Jl. Emy Saelan No. 53 Palu	Bank Perkreditan Rakyat
4	Herlambang Wibowo	Jl. Rowiga No 17 Palu	Perdagangan Rokok dan Tembakau
5	Moh. Rendy Ahmad	Jl Maleo Blok E No 89 Palu	Perdagangan Peralatan Kantor
6	Denny Candra	Jl. Pramuka No. 15 Palu	Perdagangan Eceran Kusus BBM
7	H. Diana Sawing	Jl. Mulawarman No. 15 Palu	Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi
8	Marten Sima	Jl. Otista lngg Anutapura	Perdagangan Alat Laboratorium
9	Charles F Raming	Jl. Slamet Riyadi No. 21	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
10	Lucia Aryati	Jl. Macan No 8 Palu	Angkutan Darat Untuk Barang
11	Helly Marthianus	Jl. Towua Irg. Sintuwu	Konstruksi Jalan Raya
12	Robby Kwandy	Jl. Karanja Lembah	Perdagangan Berbagai Macam Barang
13	Ir. Harlim	Jl. Gawalise No. 5 Palu	Real estat yg dimiliki Sendiri
14	Makmur Baculu	Jl. BTN Griya Palupi	Konstruksi Jalan Raya
15	Chandra Pratama	Jl. Veteran No. 22	Perdagangan Komputer
16	Leonard Y. Sarapang	Jl. Kancil No. 5 Palu	Perdagangan Komputer
17	Mohammad Puluko	Jl. Elang III No 12	Angkutan Barang Untuk Darat
18	M. Nizar Rahmatu	Jl. Munif Rahman Palu	Real Estat yg dimiliki Sendiri
19	Yakob Efrien	Jl. Kalora Nunu	Penggalian Batu Pasir dan Tanah laut
20	H. Abdul Rahim Lira	Jl. Gunung Sidole	Angkutan Bermotor Untuk Barang
21	Buruken S Buntulabi	Jl. Sabande Pantoloan	Jasa Penunjang Lainnya
22	M. Ikbal, SE,MM	Jl. Soekarno Hata	Perdagangan Alat Transportasi
23	Yusran Kawawi	Jl. Purnawirawan Palu	Instalasi Sistem Kelistrikan
24	Melda Djiadi	Jl. Durian No. 89 Palu	Perdagangan Berbagai Macam Material
25	Tonny Chandra	Jl. Tupai No. 8/9	Perdagangan Berbagai Macam Material
26	Hepy Y Manoppo	Jl. Kelurahan Watusampu	Penggalian Batu Hias
27	Ko Jefri	Jl. Basuki Rahmad No. 50 C	Pembiayaan Konsumen
28	Hotman Sihotang	Jl. Setia Budi No. 65 Palu	Jasa Kebugaran (SPA)
29	Bambang Wicaksono	Jl. Pattimura No 72 Palu	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
30	D.L Sitorus	Jl. Banteng No. 42 Palu	Perdagangan Barang Logam
31	Asep Sudirman	Jl. Mokolambake No. 2 Palu	Wisata Tirta
32	Davis	Jl. Hang Tuah Palu	Bank Umum Syariah
33	Yauhanis,SH,MH	Jl. Moh. Yamin Rukan	Penggalian Batu
34	Machatir Mastura	Jl. RE. Martadinanata Palu	Perdagangan Berbagai Macam Material
35	Murdiono	Jl. Perum Metro Regency	Perdagangan Besar Kakao

Komunikasi

Variabel komunikasi adalah cara melakukan pembicaraan untuk mensinergiskan tujuan dari suatu maksud pekerjaan yang dilakukan secara efektif agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi, namun seiring dengan semakin berkembangnya dunia komunikasi terdapat beberapa sarana pendukung yang dapat digunakan seperti telpon, handphone, email

dan lain-lain. Menurut peneliti bahwa komunikasi adalah pembicaraan yang dilakukan antara kedua orang atau lebih untuk mencapai suatu kesepahaman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan yang tengah dihadapi masyarakat maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan itu gagal, namun adakalanya suatu kebijakan

publik perlu menjalani proses tertentu baru dapat dilihat hasilnya. Terbukti hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan program kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu telah menjalankan sistem Komunikasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang serta dapat dilihat bahwa BP2T ini menjalankan koordinasi antar Dinas teknis terkait

Namun dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat merasakan masih kurangnya informasi yang di dapatkan. Hal ini tidak sesuai dengan Prinsip komunikasi yang disampaikan oleh Edward III yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung iprinsip dari komukasi karena pengertian dari komunikasi sekecil apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus di sampaikan kepada masyarakat dan informasi harus up to date. Dalam hal ini Peneliti berpendapat agar kinerja kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PERDA Nomor 17 Tahun 2012 antara lain yaitu:

1. Program kerja harus bisa mengatasi permasalahan yang ada sehingga harapan (tujuan dan sasaran) dibuatnya relatif sama atau sama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Perlu adanya komitmen dari para stakeholder serta masyarakat dalam pelibatan program kerja.

Sumber daya

Variabel sumber daya dalam hal ini adalah staf yang berkerja dalam suatu organisasi baik dalam pemerintahan maupun yang dalam hal ini melaksanakan serta merumuskan suata kebijakan. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan yang mempunyai daya saing sehingga dalam merumuskan suatu

kebijakan dapat berdaya guna. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat terbukti bahwa sumber daya manusia yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu sudah bekerja secara maksimal diperkuat dengan pernyataan dari kepala BP2T yang sudah melakukan pelatihan bagi staf walaupun pendapat dari masyarakat belum merasa puas dan hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III karena di katakan Sumber daya sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan yang meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. dengan hasil kerja yang sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaan dilapangan sangat terkendala dengan belum adanya mobil operasional kusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional dilapangan. Apabila peneliti melihat dari hasil wawancara di atas pelaksanaan untuk pengembangan SDM hanya berdasarkan kemampuan diklat dan studi banding sedangkan skill individu tidak di nampakkan untuk itu peneliti berpendapat agar pengembangan skill individu dapat menjadi tolok ukur dalam penerapan penempatan karyawan atau pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu telah melaksanakan program kerja sesuai dengan perencanaan semula, namun dalam pelaksanaannya tidak maksimal dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012, masih dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia.

Disposisi

Variabel Disposisi merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dalam bentuk menyerahkan pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Hal ini berarti harus dilaksanakan secara teliti sebelum dilimpahkan karena

kadang dalam pelimpahan kebijakan belum dilakukan secara maksimal sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disposisi merupakan pelaksanaan suatu kegiatan dapat ditindaklanjuti hasilnya oleh staf namun dalam pelaksanaannya kalau tidak dijalankan akan memberikan dampak negatif atau kegiatan akan terhalang, hal ini berarti bahwa suatu disposisi sebelum dilakukan harus dianalisis sesuai dengan metoda yang akan dilaksanakan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan yang pada akhirnya menghasilkan pelaksanaan yang benar.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 sampai dengan saat ini, telah memberikan hasil yang maksimal walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan.

Struktur Birokrasi

Variabel Struktur birokrasi adalah mekanisme hirarki dalam sebuah organisasi pemerintahan dan memiliki pembagian tugas kewenangan dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini Struktur birokrasi harus dapat mendistribusikan pekerjaan secara merata sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan konsep semula. Suatu kelembagaan dapat efektif, efisien, apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan struktur birokrasi harus benar-benar berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu sudah mencerminkan Pemanfaatan dari struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut terbukti bahwa Struktur Birokrasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu sudah berjalan sesuai dengan harapan telah melakukan distribusi pekerjaan kepada bidang-bidang yang ada tetapi masih terkendala dengan bidang penanaman modal yang berada pada BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Palu. Birokrasi merupakan salah

satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 :26-151). Menurut pendapat peneliti walaupun pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan sistem yang ada, jangan berhenti harus lebih meningkatkan lagi kinerja sehingga dalam penerapan program kerja kedepan akan lebih maksimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal belum terlaksana secara efektif karena ditinjau dari aspek karena tim yang dulunya dibentuk untuk menangani Masih terdapatnya ego dari dinas terkait dalam melaksanakan pelayanan perizinan sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif.

Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat merekomendasikan dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Kiranya kepala daerah (walikota) Palu bersikap tegas dalam melaksanakan peraturan daerah (perda) nomor 17 Tahun 2008 terutama pada pelaksanaan Pelayanan Perizinan, agar koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kota Palu dengan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Palu dapat di maksimalkan lagi
- 2) Agar prosedur Pelayanan Perizinan dilakukan sesederhana mungkin
- 3) Diharapkan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Palu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami secara tepat tentang mekanisme pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan yang benar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Nawawi Natsir, M.Si dan Dr. Intam Kurnia, M.Si yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulwahab, S., 2008, *Analisis Kebiaksanaan dan Formulasi ke inplementasi kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. Arikunto,
- Agustin, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebyakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ali, Farid. 2011. *Teori dan Konsep Adminsitasi dari Pemikiran Paradikmatik Menuju Redefinisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nded.
- Duun, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan, Samodra Wibawa, dkk - Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press,
- Edward III, George C. 1980, *"Implementing Publik Policy"* Washington DC Congressioinal Quarterly Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Jeddawi, Mullin 2008. *Reformasi Birokrasi*, Kelembagaan dan Pembinaan PNS, Jalcrata: Kreasi Total Media
- Keban, Y. T., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrosi Publik: Konsep Teori dan Isu*, Gava Media, YogYakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik* PT. Pembaharuan, Yogyakarta.
- Kusumanggara, S., 2010, *Model dan Aktor dalom Proses Kehijakan Puhlik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Islamy, M, I., 1996, *Kebijakan Publik Model-UT*, Karunika UT, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, 2001, *Metode Penelition Naturalistik Kudlitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Inplementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Herbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Putra, Fadillah, 2009. *Sound Governance: Arah Baru Paradigms Pembangunan*. Jakarta.
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*, Tangerang-Banteng: Pustaka Arif
- Ratminto dan Atik S. Winarsih, 2007, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung: Refika Aditama